



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA**

1721 - A2

NOMOR : P1/

☐

Pembetulan Ke

☐

Pembatalan

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

0 6 0 6

TAHUN PEROLEHAN PENGHASILAN

2 0 2 5

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP : 601305428421000
A.2 NIP/ NRP : 199004162025211022
A.3 NAMA : OPI LESMANA

A.4 PANGKAT/ : V / V
GOLONGAN

A.5 NAMA JABATAN : Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAP) Penyelia

A.6 JENIS KELAMIN : ☒ LAKI - LAKI ☐ PEREMPUAN

A.7 NIK : 3217011210900006

A.8 STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

K / 01

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1. GAJI POKOK / PENSIUN		20.092.000
2. TUNJANGAN ISTRI		2.009.200
3. TUNJANGAN ANAK		401.840
4. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN		0
5. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL		0
6. TUNJANGAN BERAS		1.738.080
7. TUNJANGAN KHUSUS		248
8. TUNJANGAN LAIN - LAIN		0
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)		24.241.368
PENGURANG		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN		1.212.068
11. IURANG PENSIUN ATAU IURAN THT		0
12. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DI BAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA		0
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)		1.212.068
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 -13)		23.029.300
15. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)		23.029.300
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		63.000.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)		0
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		0
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
21. PPh PASAL 21 DI TANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
22. PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DI KREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)		0
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DI POTONG DAN DI LUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR		0
23a. PPh PASAL 21 DI POTONG		0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		0
24. PPh PASAL 21 KURANG BAYAR /LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR		0
24a. PPh PASAL 21 DI POTONG		0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		0

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01 ☐ DIPINDAHKAN C.02 ☐ PINDAHAN C.03 ☐ BARU C.04 ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

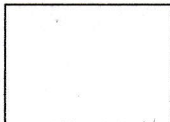
D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 0 0 0 1 4 9 4 3 5 4 3 3 0 0 0
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN KARAWANG - JABAR (03)

D.3 ID Sub Unit Organisasi : _____

D.4 Tanggal : 3 1 1 2 2 0 2 5

D.5 NAMA PENANDATANGAN : TETI SRI MULYATI

D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah



REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021)

1500200 ◆ informasi@pajak.go.id ◆

pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : BPE-
44720/CT/KPP.0908/2026

Tanggal : 23 Februari 2026

NPWP : 3217011210900006

Nama Wajib Pajak : OPI LESMANA

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2025

Masa Pajak : Januari - Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal
Terima SPT : 23 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh
Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan
Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.